



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 (Kotak Pos 46) Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 5253004. Faksimili : (021) 5253165

Laman : www.kemenkumham.go.id, Email : perencanaan.bmn@kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.4-PB.01.03-715 27 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penelaahan RKBMN Pengadaan Tahun 2024 dengan
Aplikasi e-BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212S);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242).
- f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PB.01.02 Tahun 2021 tentang Pedoman SBSK Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan rujukan pada angka 1 huruf (d) dan (f), Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 yang disusun mulai tanggal 12 Juli s.d. 2 September 2022 menggunakan aplikasi Sistem Manajemen BMN Terpadu (e-BMN);
- b. Pada tanggal 23 s.d. 29 September 2022 telah dilakukan penelaahan dan penelitian RKBMN Tahun 2024 (e-BMN) tingkat Kementerian oleh Biro Pengelolaan BMN dengan Unit Eselon I beserta seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Grand Mercure Yogyakarta;

- c. Pada bulan Oktober s.d. Desember 2022 dilakukan verifikasi, validasi, dan finalisasi terhadap RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 (e-BMN) oleh Biro Pengelolaan BMN.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil penelaahan RKBMN Kementerian Hukum dan HAM (e-BMN) Pengadaan Tahun 2024. Hasil Penelaahan RKBMN ini agar digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Pengelolaan BMN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Novita Ilmaris
NIP 19761117 199903 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lampiran Surat
Nomor : SEK.4-PB.01.03-715
Tanggal : 27 Februari 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
11. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
36. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
37. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
38. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
39. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
41. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung;
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
43. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
44. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat;
45. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

NO	URAIAN BARANG	SBSK	EKSISTIN G	KEBUTUHAN RIIL	JUMLA H	PERSETUJUAN
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
59	3.05.02.06.019 - Stabilisator	2	0	2	1	1
60	3.05.02.06.020 - Camera Video	5	0	5	2	2
61	3.05.02.06.023 - Timbangan orang	1	0	1	1	1
62	3.05.02.06.036 - Dispenser	25	6	19	6	6
63	3.05.02.06.046 - Handy Cam	2	0	2	1	1
64	3.06.01.01.002 - Audio Mixing Portable	2	1	1	1	1
65	3.06.01.01.088 - Voice Recorder	5	0	5	2	2
66	3.06.01.01.091 - Digital LED Running Text	3	2	1	1	1
67	3.06.01.02.016 - Video Switcher	2	0	2	1	1
68	3.06.01.02.034 - Teleprompter	2	0	2	1	1
69	3.06.01.02.045 - Tripod Camera	2	1	1	1	1
70	3.06.01.02.055 - Lighting Stand Tripod	4	0	4	1	1
71	3.06.01.02.061 - Lensa Kamera	10	1	9	2	2
72	3.06.01.02.118 - Head Set	15	0	15	5	5
73	3.06.01.02.128 - Camera Digital	9	2	7	2	2
74	3.06.01.02.130 - Lampu Blitz Kamera	5	1	4	2	2
75	3.06.01.02.132 - Video Conference	3	0	3	1	1
76	3.06.01.02.135 - LCD Monitor	33	0	33	11	11
77	3.06.01.02.158 - Monopod	2	0	2	1	1
78	3.06.01.02.160 - Computer Editing	4	0	4	4	4
79	3.06.01.02.164 - Video Splitter	2	0	2	1	1
80	3.06.01.02.165 - Camera Conference	12	0	12	4	4
81	3.06.01.02.167 - Drone	3	0	3	1	1
82	3.06.01.02.168 - Video Wall	5	0	5	2	2
83	3.06.02.01.006 - Handy Talky (HT)	46	9	37	12	12
84	3.07.01.01 - Alat Kedokteran Umum	2	0	2	2	2
85	3.07.01.01.005 - Tensimeter	2	0	2	1	1
86	3.07.01.01.097 - Lemari Obat (kaca)	4	0	4	1	1
87	3.07.01.01.172 - Digital Thermometer	10	0	10	3	3
88	3.07.01.02 - Alat Kedokteran Gigi	2	0	2	1	1
89	3.07.01.05 - ALAT KESEHATAN KEBIDANAN	1	0	1	1	1
90	3.07.01.07 - Alat Kedokteran Mata	1	0	1	1	1
91	3.10.01.02.001 - P.C Unit	128	42	86	29	29
92	3.10.01.02.002 - Lap Top	42	39	3	1	1
93	3.10.02.03.004 - Scanner (Peralatan Personal Komputer)	12	6	6	6	6
94	3.17.01.19.013 - Submersible Pump	3	0	3	1	1
95	3.19.01.02.001 - Alat Tenis Meja	2	0	2	2	2
96	3.19.01.02.002 - Alat Volley	2	0	2	2	2
97	3.19.01.02.999 - Peralatan Permainan Lainnya (Arena bermain anak-anak)	2	0	2	2	2
013123200409155000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM						
1	3.01.01.11.004 - Water Treatment (Mesin Proses)	5	0	5	2	2
2	3.01.03.02.001 - Elevator /Lift	40	0	40	10	10
3	3.01.03.02.005 - Gandola	6	0	6	2	2
4	3.01.03.04.001 - Transportable Generating Set	2	0	2	1	1
5	3.01.03.04.003 - Stationary Generating Set	2	0	2	1	1
6	3.01.03.05.002 - Portable Water Pump	2	0	2	2	2
7	3.01.03.05.010 - Pompa Air	35	0	35	21	21
8	3.02.01.02.001 - Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	0	1	1	1
9	3.02.01.02.002 - Micro Bus (Penumpang	4	1	3	2	2

NO	URAIAN BARANG	SBSK	EKSISTIN G	KEBUTUHAN RIL	JUMLA H	PERSETUJUAN
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
10	3.02.01.03.002 - Pick Up	2	0	2	1	1
11	3.02.01.03.008 - Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	2	0	2	2	2
12	3.02.02.01.002 - Gerobak Dorong	2	0	2	1	1
13	3.02.02.01.009 - Baggage Trolley	5	0	5	5	5
14	3.02.02.02.003 - Kursi Roda	4	0	4	2	2
15	3.05.01.03.009 - Mesin Fotocopy Electronic	1	0	1	1	1
16	3.05.01.04.001 - Lemari Besi/Metal	526	9	517	50	50
17	3.05.01.04.003 - Rak Besi	121	6	115	50	50
18	3.05.01.04.004 - Rak Kayu	4	0	4	4	4
19	3.05.01.04.005 - Filing Cabinet Besi	8	0	8	8	8
20	3.05.01.04.007 - Brandkas	5	2	3	1	1
21	3.05.01.04.008 - Peti Uang/Cash Box/Coin Box	3	0	3	1	1
22	3.05.01.04.015 - Locker	3	1	2	2	2
23	3.05.01.04.016 - Roll Opek	5	0	5	5	5
24	3.05.01.04.020 - Lemari Display	3	0	3	3	3
25	3.05.01.04.025 - Lemari Katalog	1	0	1	1	1
26	3.05.01.04.029 - Box Camera	2	0	2	1	1
27	3.05.01.05.001 - Tabung Pemadam Api	31	9	22	5	5
28	3.05.01.05.002 - Hydrant	5	0	5	2	2
29	3.05.01.05.003 - Sprinkler	31	0	31	31	31
30	3.05.01.05.004 - Fire Alarm	31	0	31	10	10
31	3.05.01.05.007 - CCTV - Camera Control Television System	7	1	6	2	2
32	3.05.01.05.008 - Papan Visual/Papan Nama	36	0	36	12	12
33	3.05.01.05.010 - White Board	12	0	12	12	12
34	3.05.01.05.015 - Alat Penghancur Kertas	10	3	7	2	2
35	3.05.01.05.017 - Mesin Absensi	11	2	9	3	3
36	3.05.01.05.027 - Alat Pencetak Label	2	0	2	1	1
37	3.05.01.05.029 - Hand Metal Detector	8	0	8	2	2
38	3.05.01.05.039 - Display	31	0	31	5	5
39	3.05.01.05.045 - Penangkal Petir	35	0	35	10	10
40	3.05.01.05.048 - LCD Projector/Infocus	22	2	20	6	6
41	3.05.01.05.049 - Flip Chart	50	0	50	50	50
42	3.05.01.05.053 - Acces Control System	5	0	5	5	5
43	3.05.01.05.056 - Panic Button System, Alarm Indicator	1	0	1	1	1
44	3.05.01.05.057 - Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	6	0	6	6	6
45	3.05.01.05.058 - Focusing Screen/Layar LCD Projector	22	5	17	5	5
46	3.05.01.05.074 - Alat Penghancur Lemari	1	0	1	1	1
47	3.05.01.05.075 - Walkthrough/ Portal Metal Detector	1	0	1	1	1
48	3.05.01.05.082 - Mesin Fogging	3	2	1	1	1
49	3.05.01.05.999 - Perkakas Kantor Lainnya	4	0	4	4	4
50	3.05.02.01.002 - Meja Kerja Kayu	716	27	689	500	500
51	3.05.02.01.003 - Kursi Besi/Metal	3150	68	3082	2000	2000
52	3.05.02.01.005 - Sice	24	1	23	5	5
53	3.05.02.01.006 - Bangku Panjang Besi/Metal	34	0	34	34	34
54	3.05.02.01.008 - Meja Rapat	15	2	13	4	4
55	3.05.02.01.009 - Meja Komputer	14	10	4	1	1

NO	URAIAN BARANG	SBSK	EKSISTIN G	KEBUTUHAN RIL	JUMLA H	PERSETUJUAN
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
56	3.05.02.01.010 - Tempat Tidur Besi	911	0	911	700	700
57	3.05.02.01.016 - Kasur/Spring Bed	1040	0	1040	346	346
58	3.05.02.01.018 - Meja Makan Besi	56	0	56	56	56
59	3.05.02.01.019 - Meja Makan Kayu	56	0	56	56	56
60	3.05.02.01.024 - Rak Sepatu (Alumunium)	5	0	5	5	5
61	3.05.02.01.026 - Nakas	716	0	716	238	238
62	3.05.02.03.001 - Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	11	0	11	3	3
63	3.05.02.03.003 - Mesin Pemotong Rumput	20	0	20	6	6
64	3.05.02.03.004 - Mesin Cuci	11	0	11	4	4
65	3.05.02.04.001 - Lemari Es	14	1	13	4	4
66	3.05.02.04.004 - A.C. Split	279	20	259	83	83
67	3.05.02.04.006 - Kipas Angin	31	0	31	10	10
68	3.05.02.04.007 - Exhause Fan	31	0	31	31	31
69	3.05.02.05.002 - Kompor Gas (Alat Dapur)	6	0	6	2	2
70	3.05.02.05.004 - Teko Listrik	1	0	1	1	1
71	3.05.02.05.005 - Rice Cooker (Alat Dapur)	4	0	4	2	2
72	3.05.02.05.008 - Kitchen Set	16	0	16	16	16
73	3.05.02.05.009 - Tabung Gas	6	0	6	2	2
74	3.05.02.05.024 - Heating Set	1	0	1	1	1
75	3.05.02.06.002 - Televisi	26	11	15	6	6
76	3.05.02.06.005 - Amplifier	12	0	12	12	12
77	3.05.02.06.006 - Equalizer	12	0	12	12	12
78	3.05.02.06.007 - Loudspeaker	29	0	29	29	29
79	3.05.02.06.008 - Sound System	14	3	11	4	4
80	3.05.02.06.013 - Megaphone	12	2	10	10	10
81	3.05.02.06.014 - Microphone	51	0	51	30	30
82	3.05.02.06.015 - Microphone Table Stand	10	1	9	2	2
83	3.05.02.06.016 - Mic Conference	30	0	30	10	10
84	3.05.02.06.019 - Stabilisator	2	0	2	1	1
85	3.05.02.06.020 - Camera Video	5	0	5	1	1
86	3.05.02.06.023 - Timbangan orang	1	0	1	1	1
87	3.05.02.06.036 - Dispenser	30	3	27	27	27
88	3.05.02.06.041 - Mesin Pengering Pakaian	5	0	5	2	2
89	3.05.02.06.045 - Coffee Maker	16	0	16	5	5
90	3.05.02.06.046 - Handy Cam	2	0	2	1	1
91	3.05.02.06.055 - Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	5	0	5	5	5
92	3.05.02.06.060 - Asbak Tinggi	22	0	22	22	22
93	3.05.02.06.081 - Tangki Air	15	0	15	15	15
94	3.06.01.01.002 - Audio Mixing Portable	3	0	3	1	1
95	3.06.01.01.091 - Digital LED Running Text	3	0	3	3	3
96	3.06.01.02.016 - Video Switcher	2	0	2	1	1
97	3.06.01.02.034 - Teleprompter	4	0	4	1	1
98	3.06.01.02.045 - Tripod Camera	2	0	2	2	2
99	3.06.01.02.055 - Lighting Stand Tripod	4	0	4	1	1
100	3.06.01.02.061 - Lensa Kamera	10	0	10	3	3
101	3.06.01.02.118 - Head Set	115	10	105	35	35
102	3.06.01.02.128 - Camera Digital	5	3	2	1	1
103	3.06.01.02.130 - Lampu Blitz Kamera	5	0	5	5	5
104	3.06.01.02.132 - Video Conference	6	1	5	3	3
105	3.06.01.02.135 - LCD Monitor	31	0	31	30	30
106	3.06.01.02.158 - Monopod	2	0	2	1	1
107	3.06.01.02.160 - Computer Editing	4	0	4	1	1
108	3.06.01.02.164 - Video Splitter	2	0	2	1	1

NO	URAIAN BARANG	SBSK	EKSISTIN G	KEBUTUHAN RIIL	JUMLA H	PERSETUJUAN
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7
109	3.06.01.02.165 - Camera Conference	4	0	4	1	1
110	3.06.01.02.167 - Drone	3	1	2	1	1
111	3.06.01.02.168 - Video Wall	15	0	15	5	5
112	3.06.02.01.001 - Telephone (PABX)	1	0	1	1	1
113	3.06.02.01.003 - Pesawat Telephone	10	0	10	10	10
114	3.06.02.01.006 - Handy Talky (HT)	30	3	27	9	9
115	3.06.02.06.001 - Publik Address	2	0	2	2	2
116	3.07.01.01 - Alat Kedokteran Umum	2	0	2	1	1
117	3.07.01.01.005 - Tensimeter	2	0	2	1	1
118	3.07.01.01.097 - Lemari Obat (kaca)	4	0	4	1	1
119	3.07.01.01.127 - Kursi Dorong	2	0	2	2	2
120	3.07.01.01.172 - Digital Thermometer	25	0	25	8	8
121	3.07.01.02 - Alat Kedokteran Gigi	2	0	2	1	1
122	3.07.01.05 - ALAT KESEHATAN KEBIDANAN	1	0	1	1	1
123	3.07.01.07 - Alat Kedokteran Mata	1	0	1	1	1
124	3.09.04.05.012 - Barcode Reader	5	0	5	5	5
125	3.10.01.02.001 - P.C Unit	160	24	136	40	40
126	3.10.01.02.002 - Lap Top	36	19	17	4	4
127	3.10.01.02.009 - Tablet PC	4	0	4	4	4
128	3.10.02.01.004 - Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	0	1	1	1
129	3.10.02.01.017 - Panaboard	6	0	6	2	2
130	3.10.02.03.003 - Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	13	8	1	1
131	3.10.02.03.004 - Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	3	4	3	3
132	3.10.02.04.001 - Server	100	0	100	30	30
133	3.10.02.04.002 - Router	100	0	100	30	30
134	3.10.02.04.004 - Modem	100	0	100	30	30
135	3.10.02.04.005 - Netware Interface External	100	0	100	30	30
136	3.10.02.04.006 - Repeater and Transciever	100	0	100	30	30
137	3.10.02.04.013 - Terminal	100	0	100	30	30
138	3.10.02.04.014 - Rak Server	100	0	100	30	30
139	3.10.02.04.016 - Switch Rak	100	0	100	30	30
140	3.10.02.04.023 - Wireless Access Point	62	0	62	20	20
141	3.10.02.04.027 - Rackmount	100	0	100	30	30
142	3.10.02.04.030 - Network Cable Tester	1	0	1	1	1
143	3.10.02.04.034 - Optical Termination Box	100	0	100	30	30
144	3.17.01.19.013 - Submersible Pump	3	0	3	1	1
145	3.18.01.02.003 - Rambu Cermin	30	0	30	10	10
146	3.18.02.05.004 - Sirine (Signal)	1	0	1	1	1
147	3.19.01.02.001 - Alat Tennis Meja	5	1	4	4	4
148	3.19.01.02.002 - Alat Volley	2	0	2	2	2
149	3.19.01.02.003 - Alat Bilyard	1	0	1	1	1
150	3.19.01.02.999 - Peralatan Permainan Lainnya (Arena bermain anak-anak)	2	0	2	2	2
151	3.19.01.03.005 - Peralatan Fitnes	7	0	7	7	7
152	3.19.01.03.009 - Argocycle	7	0	7	7	7
153	3.19.01.03.010 - Treadmill	5	0	5	5	5
154	3.19.01.03.011 - Orbitrek	5	0	5	5	5
155	3.19.01.06.003 - Sepeda Olah Raga	60	0	60	30	30
156	6.01.01.01.001 - Monografi	30000	0	30000	10000	10000
157	6.02.01.01.002 - Alat Musik Modern/Band	3	0	3	3	3
Wilayah : 3300 - WILAYAH PAPUA BARAT						



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 (Kotak Pos 46) Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 5253004. Faksimili : (021) 5253165

Laman : www.kemenkumham.go.id, Email : perencanaan.bmn@kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.4-PB.01.03-612 15 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Penelaahan RKBMN SIMAN Tahun 2024
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI

Yth. Daftar Terlampir
di Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212S);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);
- f. Surat Direktur Perumusan Kebijakan a.n Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-100/KN/KN.2/2022 tanggal 24 Juni 2022 hal Pemberitahuan Jadwal Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAL-K/L) Tahun Anggaran 2024;
- g. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.6/2023 tanggal 19 Januari 2023 hal Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan rujukan pada angka 1 huruf (d) dan (f), Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 yang disusun mulai tanggal 12 Juli s.d 2 September 2022 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);

- b. Pada tanggal 7 November 2022 telah disampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 kepada DJKN, Kementerian Keuangan setelah dilakukan reviu oleh APIP;
 - c. Pada tanggal 28 Desember 2022 dilakukan forum penelaahan antara Biro Pengelolaan BMN dengan Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN), DJKN terhadap RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 atas permintaan DJKN, Kementerian Keuangan;
 - d. Pada tanggal 19 Januari 2023 telah diterbitkan hasil penelaahan terhadap usulan RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 oleh Kementerian Keuangan melalui surat sebagaimana tercantum dalam rujukan huruf g.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hasil penelaahan RKBMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024. Hasil Penelaahan RKBMN ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk Tahun anggaran 2024.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Pengelolaan BMN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Novita Ilmaris
NIP 19761117 199903 2 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lampiran Surat

Nomor : SEK.4-PB.01.03-612

Tanggal : 15 Februari 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal;
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
11. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
12. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
16. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
20. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat;
21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau;
22. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan;
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
25. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
27. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;
28. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
29. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;
30. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah;
31. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
32. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
33. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
34. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
35. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat;
36. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur;
37. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
38. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
39. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
40. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten;
41. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung;
42. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo;
43. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau;
44. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat;
45. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-37/MK.6/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

19 Januari 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p.

Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Pengelolaan BMN atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.4-PB.01.03-4127 tanggal 4 November 2022 hal Penyampaian Dokumen RKBMN Kementerian Hukum dan HAM RI untuk RKA-K/L Tahun Anggaran 2024, pada prinsipnya kami menyetujui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sebagaimana diuraikan pada lampiran surat ini.

Untuk selanjutnya, RKBMN Hasil Penelaahan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RKBMN Hasil Penelaahan menyajikan informasi berupa satuan BMN yang direkomendasikan untuk dilakukan pengadaan dan pemeliharaan.
2. RKBMN Hasil Penelaahan untuk pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN dapat mengakibatkan belanja modal dan belanja barang dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. RKBMN Hasil Penelaahan RKBMN pada Satuan Kerja (Satker) yang belum sepenuhnya melaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN, dilaksanakan setelah Satker yang bersangkutan menyelesaikan PSP atas seluruh BMN berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. RKBMN Hasil Penelaahan dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan perubahan.
5. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyampaian batas waktu revisi anggaran.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Rionald Silaban





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara

Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 7 Utara (APT) Jalan Lapangan Banteng Timur
Nomor 2-4, Jakarta 10710 Call Center 1500-991; Situs www.djkn.kemenkeu.go.id



LAMPIRAN
Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara
a.n. Menteri Keuangan
Nomor : S-37/MK.6/2023
Tanggal : 19 Januari 2023

IKHTISAR
RKBMN HASIL PENELAAHAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Penelaahan RKBMN dilaksanakan guna memperoleh keyakinan memadai dalam memenuhi amanat Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN yaitu relevansi program dengan *output* BMN, dan optimalisasi serta efektifitas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang. Berdasarkan penelaahan RKBMN BNPB, terdapat RKBMN yang disetujui dan tidak disetujui. RKBMN yang disetujui adalah sebagaimana RKBMN Hasil Penelaahan Pengadaan dan RKBMN Hasil Penelaahan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024. Adapun RKBMN yang tidak disetujui adalah sebagaimana Rincian RKBMN Hasil Penelaahan Pengadaan dan RKBMN Hasil Penelaahan Pemeliharaan yang tidak dapat disetujui Tahun Anggaran 2024.

RKBMN Hasil Penelaahan menjadi dasar bagi Pengguna Barang dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran Kementerian/Lembaga.

Adapun penjelasan RKBMN yang tidak disetujui sebagai berikut:

1. Hasil Penelaahan RKBMN Pengadaan
 - a. Sebanyak 1 (satu) bidang tanah dengan luas 3.500 m² berupa Tanah Untuk Kantor tidak dapat disetujui karena sudah mendapatkan aset berupa tanah dari rampasan KPK.
 - b. Sebanyak 16 (enam belas) unit Bangunan Gedung Untuk Kantor dengan luas 29.455 m² tidak dapat disetujui karena tidak sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).
 - c. Sebanyak 62 (enam puluh dua) unit Tanah Untuk Rumah Negara dengan luas 9.070 m² tidak dapat disetujui karena tidak sesuai dengan PMK 153/PMK.06/2021.
 - d. Sebanyak 95 (sembilan puluh lima) unit Bangunan Gedung Untuk Rumah Negara dengan luas 5.482 m² tidak dapat disetujui karena tidak sesuai dengan PMK 153/PMK.06/2021.
 - e. Sebanyak 300 (tiga ratus) unit Kendaraan Dinas Jabatan tidak dapat disetujui karena tidak sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).
 - f. Sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) unit Kendaraan Dinas Operasional tidak dapat disetujui karena tidak sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK).
2. Hasil Penelaahan RKBMN Pemeliharaan yang tidak disetujui yaitu 24 (dua puluh empat) unit BMN berupa Alat Angkutan Bermotor Darat, 22 (dua puluh dua) unit Gedung dan Bangunan seluas 9.806 m², 51.168 unit BMN Lainnya karena tidak disetujui berdasarkan rewiu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau BMN tidak material (lebih efisien dilakukan pembelian baru dibandingkan dengan dilakukan pemeliharaan).



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	KEBUTUHAN RIIL BMN	KEBUTUHAN DISETUIJI	PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA		KETERANGAN	
						SKEMA	KUANTITAS (m2)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	EBB	Kendaraan Bermotor	3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	1	1	Pembelian	1	Setuju 1 unit sejumlah yg akan dihapus (eksisting 1, akan hapus 1)
XVII	01312 - BPSDM								
	0131205	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Ham							
A	013121700KD - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM HAM SULUT								
1	013121700409159000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA / KOTA BITUNG								
	5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah							
	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	001	Kendaraan Bermotor	3020101003	Station Wagon	1	1	Sewa	1	Setuju sewa 1, mengingat Inpres 7/2022 pembelian kendaraan bermotor di batasi (eksisting blm ada)
B	013123200KD - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KEPRI (BPSDM)								
1	013123200409155000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM								
	5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah							
	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	532	Kendaraan Bermotor	3020104001	Sepeda Motor	1	1	Pembelian	1	Setuju 1 unit (SBSK 3, eksisting 2)
	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	533	Bangunan	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	681	681	Pembelian	681	Setuju 681m2 (eksisting blm ada)
	533	Bangunan	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	70	70	Pembelian	70	setuju 1 unit (ada pembahasan PU, eksisting blom ada)
	533	Bangunan	4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	150	150	Pembelian	150	setuju 3 unit (ada pembahasan PU, eksisting blom ada)

NO	JENIS BELANJA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KETERANGAN
					UNIT/BIDANG	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	52312	3050206008	Sound System	Digunakan Sendiri	5	0	
	52312	3050206017	Unit Power Supply	Digunakan Sendiri	15	0	
	52312	3050206020	Camera Video	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3060102128	Camera Digital	Digunakan Sendiri	2	0	
	52312	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	60	0	
	52312	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	10	0	
	52312	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	16	0	
C	013121700 - KANWIL KEMENTERIAN HUKUM HAM SULUT				51	3,000	
1	013121700409159000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA / KOTA BITUNG				51	3,000	
	52311	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	2,500	
	52311	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	500	
	52312	3010304003	Stationary Generating Set	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3020101999	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	15	0	
	52312	3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Digunakan Sendiri	6	0	
	52312	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	9	0	
	52312	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	4	0	
	52312	3100102999	Personal Komputer Lainnya	Digunakan Sendiri	2	0	
	52312	3100199999	Komputer Unit Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	8	0	
D	013123200 - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM KEPRI (BPSDM)				104	0	
1	013123200409155000KD - BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU / KOTA BATAM				104	0	
	52312	3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	2	0	
	52312	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	2	0	
	52312	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Digunakan Sendiri	1	0	

NO (1)	JENIS BELANJA (2)	KODE BARANG (3)	URAIAN BARANG (4)	STATUS BARANG (5)	KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KETERANGAN (8)
					UNIT/BIDANG (6)	M2 (7)	
	52312	3050105048	LCD Projector/Infocus	Digunakan Sendiri	2	0	
	52312	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	20	0	
	52312	3050206002	Televisi	Digunakan Sendiri	11	0	
	52312	3060102128	Camera Digital	Digunakan Sendiri	3	0	
	52312	3060102132	Video Conference	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3060102167	Drone	Digunakan Sendiri	1	0	
	52312	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	24	0	
	52312	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	19	0	
	52312	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	13	0	
	52312	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	4	0	

a.n. Sekretaris Jenderal Kemenkumham
Kepala Biro Pengelolaan BMN



Novita Ilmaris
NIP 197611171999032001

Jakarta,
a.n. Menteri Keuangan
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara



Purnama T. Sianturi
NIP 196803101991032001